

ANALISIS VARIABEL SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINGKAT INKLUSI KEUANGAN NEGARA ASIA TAHUN 2010-2015

Yana Raudhatul Jannah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

David Kaluge

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Abstrak

Program inklusi keuangan di Asia mulai gencar dilakukan dengan fokusnya yaitu meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat yang belum menikmati jasa perbankan. Hal ini menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu fokus pembangunan di sektor keuangan diberbagai negara khususnya di kawasan Asia, karena sistem keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan tingkat inklusi keuangan dan melihat pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap inklusi keuangan di negara Asia tahun 2010-2015. Untuk melihat perbandingan tingkat inklusi keuangan di beberapa negara Asia digunakan metode analisis Index of Financial Inclusion (IFI) yang dikembangkan oleh Sarma (2008), sedangkan untuk menguji hubungan antar variabel sosial ekonomi terhadap inklusi keuangan digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan teknik estimasi dalam pendekatan Fixed Effects Model.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum inklusi keuangan di beberapa negara Asia utamanya dipengaruhi oleh dimensi keguanaan. Selain itu, hanya variabel GDP perkapita yang tidak signifikan berpengaruh secara parsial. Sedangkan variabel lainnya, yaitu, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk di pedesaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks inklusi keuangan.

Kata Kunci: *Inklusi keuangan, Index of Financial Inclusion, Variabel Sosial-Ekonomi..*

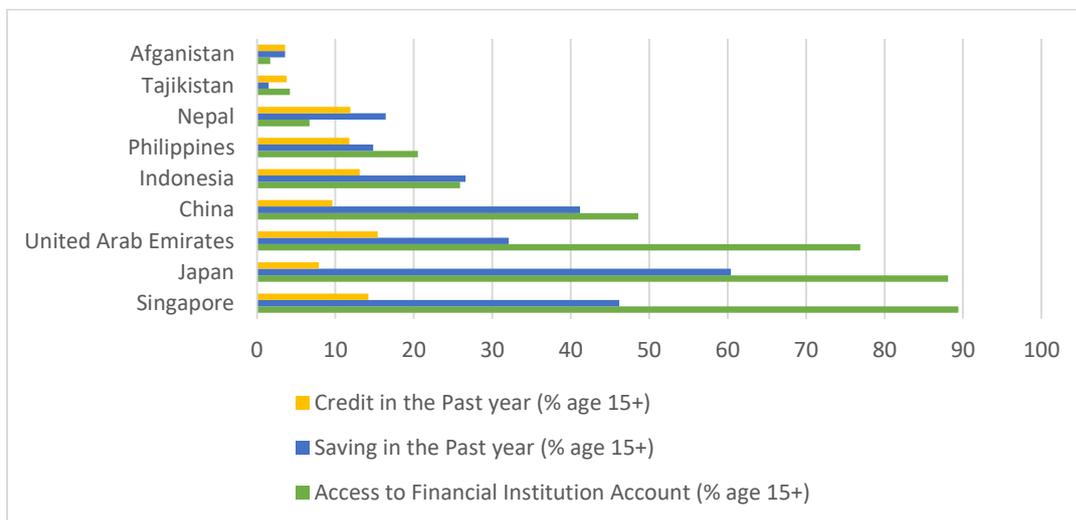
I. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan pada beberapa tahun terakhir, di mana pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang mencakup 70% pertumbuhan dunia menurun dalam lima tahun terakhir. Hal ini ditambah dengan perbaikan ekonomi di negara-negara maju. Harga komoditas energi yang rendah dan kebijakan moneter Amerika Serikat yang cukup ketat menjadi salah satu alasan perkembangan perekonomian global. Penyebab lainnya adalah Perlambatan dan *rebalancing* secara bertahap pada aktivitas perekonomian Cina (Deputi Bidang Ekonomi Kementrian PPN/Bappenas 2015).

Pertumbuhan perlambatan di Cina juga akan menekan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia berkembang yaitu Asia Tenggara dan India. Namun, jika dibandingkan dengan negara lain, tingkat PDB per kapita negara yang berada di kawasan Asia, memiliki nominal yang paling rendah dibandingkan dengan Amerika dan Eropa dengan tingkat rata-rata sebesar US\$ 1542.21 pada tahun 2015.

Hal ini didukung oleh data pada World Bank yang menyebutkan bahwa negara-negara yang berada di kawasan Asia memiliki tingkat PDB per kapita paling rendah dibandingkan pada kawasan Eropa dan Amerika. Selain karena aktivitas perekonomian Cina yang melambat, perlambatan pertumbuhan ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan sektor keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Berdasarkan Data pada International Monetary Fund (IMF) menyebutkan bahwa, kurang dari 20% masyarakat di negara Asia yang berpendapatan rendah memiliki akses di lembaga keuangan formal. Berbeda dengan Singapura, Jepang, dan Uni Emirat Arab yang lebih dari dua pertiga masyarakatnya memiliki akses terhadap jasa keuangan. Selain jumlah rekening, proporsi orang menabung lebih banyak dari jumlah proporsi orang meminjam kredit.

Gambar 1: Akses terhadap Jasa Keuangan Negara di kawasan Asia tahun 2014



Sumber: International Monetary Fund, 2017 (diolah)

Menurut data pada gambar 1, beberapa masyarakat di negara Asia belum dapat menjangkau jasa keuangan formal, khususnya perbankan, disebut dengan *unbankable people*. Hal ini disebabkan karena banyak hambatan untuk mengaksesnya. Menurut Kunt (2008), pengetahuan masyarakat tentang fungsi lembaga keuangan dan ketidaksesuaian produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dengan kebutuhan masyarakat

berpendapatan rendah menjadi salah satu penyebab dari hambatan tersebut (Dienillah and Anggraeni 2016). Selain itu hambatan juga berasal dari model bisnis bank itu sendiri, seperti posisi pasar, kondisi makroekonomi, tingkat kompetisi, serta peraturan yang dijalankan.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan yang dihadapi maka perlu dilakukan peningkatan terhadap akses jasa keuangan melalui inklusi keuangan. Program inklusi keuangan di Asia mulai gencar dilakukan dengan fokusnya yaitu meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat yang belum menikmati jasa perbankan. Hal ini menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu fokus pembangunan di sektor keuangan diberbagai negara khususnya negara yang berada di kawasan Asia, karena sistem keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Demirgüç-Kunt, Beck and Honohan 2008).

Paska krisis 2008 istilah inklusi keuangan menjadi tren terutama berasal dari dampak krisis kepada kelompok masyarakat *in the bottom of the pyramid* (masyarakat pinggiran berpendapatan rendah, tinggal di daerah terpencil yang mempunyai identitas illegal) yang umumnya *unbankable* yang tercatat sangat tinggi pada negara miskin dan berkembang (Bank Indonesia 2016). Menurut *Reserve Bank of India*, inklusi keuangan merupakan suatu proses dalam mengakses produk dan layanan keuangan yang tepat yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan biaya terjangkau yang diatur secara adil dan transparan. Definisi ini menekankan beberapa dimensi inklusi keuangan, yaitu aksesibilitas, ketersediaan dan sistem kegunaan (Demirgüç-Kunt, Beck and Honohan 2008). Dimensi ini secara bersama-sama membangun sistem keuangan yang inklusif.

Sistem keuangan merupakan inti dari proses pembangunan (Demirgüç-Kunt, Beck and Honohan 2008). Sehingga dengan adanya inklusi keuangan mampu memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah, dan pihak swasta. Beberapa manfaat yang akan didapat dengan adanya program inklusi keuangan antara lain, meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI), berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan kemiskinan.

Menurut Sarma (2012) dalam penelitiannya IFI merupakan ukuran multidimensi yang dapat digunakan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan di negara yang berbeda dan untuk memantau sejauh mana kemajuan ekonomi sehubungan dengan indeks inklusi keuangan dari waktu ke waktu.

Mencermati penelitian-penelitian terdahulu yang ada dan beberapa fenomena yang telah dijelaskan membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana perbandingan tingkat inklusi keuangan dan variabel sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap inklusi keuangan negara yang berada di kawasan Asia. Selain itu, pada penelitian ini digunakan mengadopsi variabel sosial ekonomi dalam penelitian Sarma (2012) yang dilakukan di India.

II. Metode

Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan data *cross section* dan *time series*. Data panel tersebut berupa data *cross section* yang terdiri dari sembilan negara di kawasan Asia yang dibagi dalam tiga kategori yaitu Singapura, Jepang, dan Uni Emirat Arab sebagai negara *high income*; Cina, Indonesia, dan Filipina sebagai negara *middle income*; serta Nepal, Tajikistan, dan Afganistan sebagai negara *low income*. Data *time series* tahunan periode tahun 2010-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat tahunan. Data-data ini dikumpulkan dari sumber seperti: *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, *Trading Economics*, dan sumber data lainnya. Selanjutnya, untuk menunjang literatur serta pengetahuan, penulis menggunakan literatur rambahan yang didapat dari jurnal dan penelitian ilmiah lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software Microsoft Excel 2013 dan Eviews 9*.

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis *Index of Financial Inclusion (IFI)* yang dikembangkan oleh Sarma (2008), digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di masing-masing negara dan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menggunakan teknik estimasi dengan pendekatan *Fixed Effects Model* akan digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang bersifat dependen dan memiliki beberapa varian (jenis) sehingga penulis bisa memiliki bentuk model yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Terakhir, dengan teknik regresi penulis dapat melihat dampak

perubahan nilai variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu teknik regresi sangat membantu penulis yang membutuhkan alat untuk melakukan proyeksi (peramalan) (Prof. Gudono 2012).

a. Index of Financial Inclusion (IFI)

Menurut Sarma (2008) sistem keuangan inklusi dinilai dari tiga dimensi, pertama, penetrasi perbankan yang digambarkan oleh jumlah rekening deposito di bank komersial per 1000 populasi dewasa. Selanjutnya adalah ketersediaan jasa keuangan yang digambarkan oleh jumlah mesin ATM per 100000 populasi dewasa. Terakhir, kegunaan yang digambarkan oleh proporsi kredit terhadap GDP. Sehingga untuk menghitung setiap dimensi digunakan rumus berikut:

$$d_i = \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i} \tag{1}$$

Sedangkan Indeks inklusi keuangan, IFI, untuk negara pada tahun ke i yang diukur dengan normalisasi terbalik Euclidean jarak pada titik D. Persamaannya adalah:

$$IFI_i = 1 - \frac{\sqrt{(1-d_1)^2 + (1-d_2)^2 + \dots + (1-d_n)^2}}{\sqrt{n}} \tag{2}$$

Dalam persamaan (2), nilai IFI berada diantara 0 dan 1, artinya dimensi memiliki peranan yang sama dalam menentukan tingkat inklusi keuangan.

b. Model Regresi Ordinary Least Square (OLS)

Langkah awal dalam estimasi data panel adalah perumusan model. Setelah merumuskan model yang akan digunakan, dilakukan pemilihan model pendekatan terbaik dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Selanjutnya dilakukan uji statistik (pengujian hipotesis individual (uji t), pengujian hipotesis berganda (uji f), dan uji koefisien determinasi (uji R²)) dan uji ekonometrika guna memenuhi uji asumsi klasik.

Dalam menganalisis determinan inklusi keuangan terhadap indikator sosial ekonomi pada negara-negara ASEAN, maka digunakan variabel dependen *index of financial inclusion* (IFI). Variabel independennya yaitu GDP perkapita, jumlah penduduk di atas 15 tahun, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk di pedesaan. Sehingga persamaan regresinya yaitu:

$$IFI_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln GDP_{it} + \beta_2 TP_{it} + \beta_3 JD_{it} + \varepsilon_{it} \tag{3}$$

III. Hasil dan Pembahasan

a. Perbandingan Indeks Inklusi Keuangan antar negara

Berikut ini akan dibahas ketiga dimensi dari indeks inklusi keuangan yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1: Dimensi Pada Inklusi Keuangan

Stat.	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Penetrasi perbankan						
Min	0.00783	0.002505	0	0.004071	0.005951	0.001253
Max	0.989039	0.991544	0.99311	0.99217	0.991857	1
Avg	0.311167	0.364234	0.380242	0.386436	0.386575	0.385914
St. Dev	0.301218	0.305809	0.305565	0.304183	0.303041	0.303265
Indeks Ketersediaan Jasa Perbankan						
Min	0	0.000691	0.000844	0.001382	0.001765	0.003147
Max	1	0.981885	0.976819	0.980043	0.974056	0.975514
Avg	0.277027	0.288336	0.324481	0.339082	0.356096	0.365955
St. Dev	0.322766	0.314578	0.299302	0.296477	0.293393	0.293472
Indeks Kegunaan						
Min	0.023409	0.003017	0.000667	0.001207	0	0.000286
Max	0.733706	0.812381	0.846239	0.936222	1	0.974304
Avg	0.214105	0.225645	0.237465	0.259483	0.272036	0.270151
St. Dev	0.227093	0.253834	0.265127	0.293967	0.313569	0.302789
Indeks Inklusi Keuangan						
Min	0.010365	0.002071	0.000504	0.002219	0.002569	0.001561
Max	0.58458	0.589729	0.590552	0.597146	0.601703	0.604859
Avg	0.243427	0.265818	0.285538	0.297029	0.304988	0.308151
St. Dev	0.217642	0.213526	0.208229	0.20886	0.209691	0.208234

Sumber: data peneliti (2017)

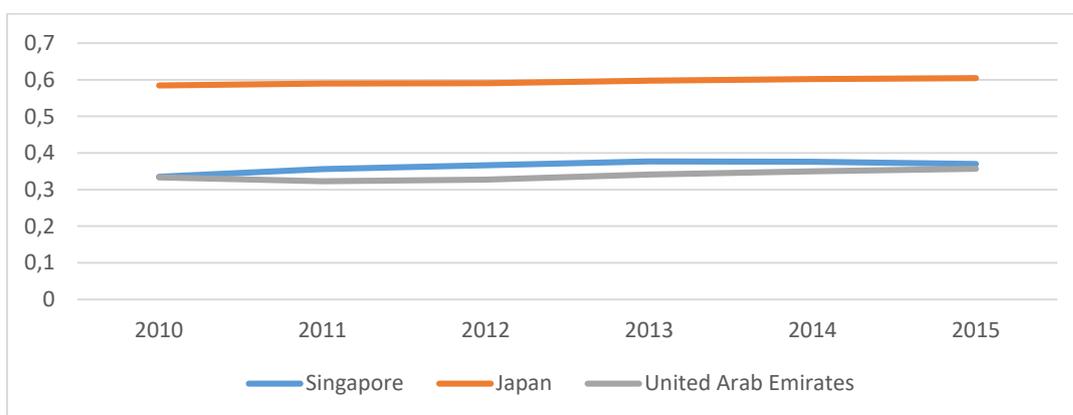
Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif IFI dengan tiga dimensi dari 9 negara Asia yang telah diestimasi. Hasilnya menunjukkan beberapa indikator seperti: minimum (Min), maksimum (Max), rata-rata (Mean), dan Standar Deviasi. Secara rata-rata, jumlah IFI beberapa negara Asia adalah 0.243427 pada tahun 2010 dan 0.308151 pada tahun 2015. IFI cenderung berubah dengan fluktuasi kecil selama periode waktu tersebut.

Dari proporsi IFI tiga dimensi, dimensi kegunaan memiliki nilai yang paling tinggi, diikuti dengan ketersediaan jasa perbankan dan penetrasi perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa inklusi keuangan pada beberapa negara Asia ditentukan oleh

dimensi kegunaan serta dimensi lain (ketersediaan jasa perbankan dan penetrasi perbankan) hanya memiliki proporsi yang lebih kecil. Salah satu kegunaan dari sistem keuangan oleh IMF diproporsikan dalam indikator proporsi kredit yang disalurkan terhadap GDP. Kredit/pinjaman ini digunakan oleh rumah tangga dan pengusaha. Menurut Sarma (2012) jasa-jasa keuangan seperti penyaluran kredit, tidak digunakan dengan baik, walaupun masyarakat memiliki akses terhadap jasa keuangan.

Perkembangan akses terhadap layanan jasa perbankan berbeda-beda disetiap negara. Pembangunan sektor terhadap jasa perbankan di negara maju lebih cepat dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari indeks inklusi keuangan yang menunjukkan sejauh mana negara tersebut memberikan akses terhadap jasa perbankan kepada masyarakatnya. Pada tabel 2 menunjukkan Tingkat inklusi keuangan dari ketiga negara *high income*, yaitu Singapura, Jepang, dan Uni Emirat Arab cenderung konstan.

Gambar 2: Nilai IFI negara Jepang, Singapura, dan Uni Emirat Arab tahun 2010-2015



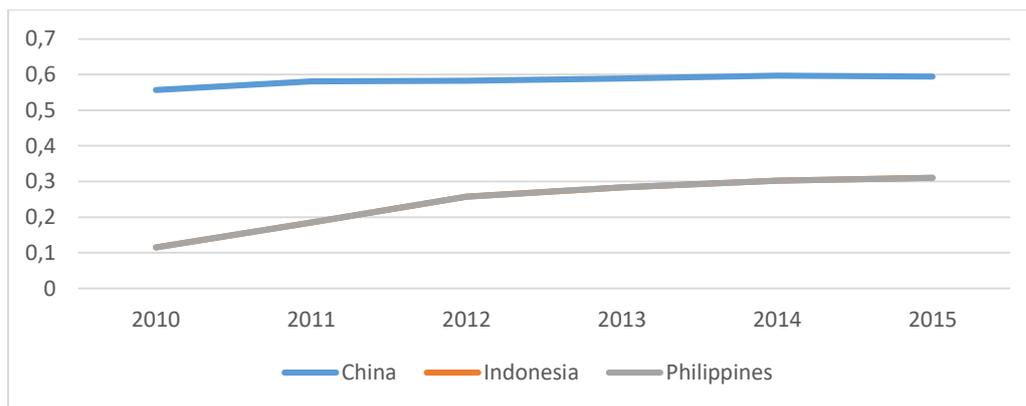
Sumber: data penelitian (2017)

Jepang merupakan negara *high income* yang tingkat inklusi keuangannya relatif tinggi dengan nilai indeks sebesar 0.6. Tingginya tingkat inklusi keuangan di Jepang dikarenakan tingginya nilai tiap-tiap dimensi dalam inklusi keuangan. Ketersediaan jasa perbankan yang dicerminkan dengan jumlah mesin ATM yang tersedia memiliki rata-rata 128 per 100.000 orang dewasa dari tahun 2010-2015. Jumlah ini paling tinggi dibandingkan negara lain yang diteliti. Namun, untuk dua negara *high income* lainnya yaitu Singapura dan Uni Emirat Arab masih memiliki tingkat inklusi keuangan yang

relatif rendah, masing-masing sebesar 0.37 untuk Singapura dan 0.35 untuk Uni Emirat Arab.

Tingginya nilai indeks inklusi keuangan di negara Jepang menunjukkan terdapat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan, dimana jasa masyarakat telah menjangkau mayoritas masyarakat di negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang cukup mampu menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pemanfaatan lembaga keuangan, khususnya jasa perbankan. Berdasarkan nilai indeksnya, inklusi keuangan di Jepang lebih inklusif dibandingkan dengan Singapura dan Uni Emirat Arab. Artinya, akses jasa keuangan di Jepang lebih mudah dibandingkan dengan Singapura dan Uni Emirat Arab.

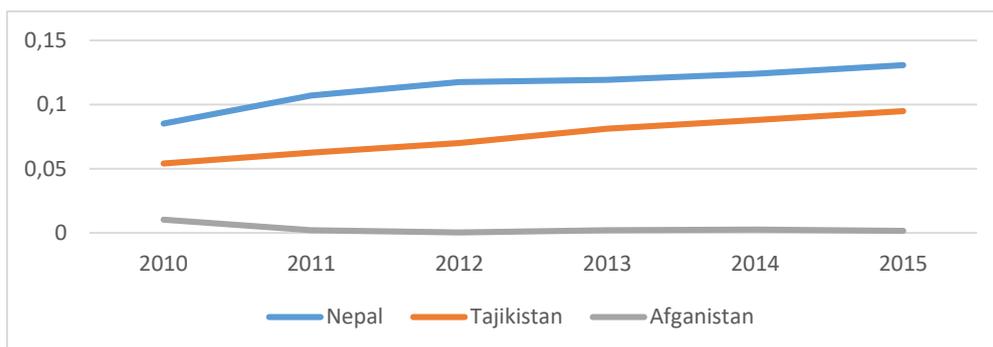
Gambar 3: Nilai IFI negara China, Indonesia, dan Filipina tahun 2010-2015



Sumber: data penelitian (2017)

Berbeda dengan negara *high income*, negara *middle income* seperti Cina, Indonesia, dan Filipina memiliki tren inklusi keuangan yang meningkat. Di mana negara Cina memiliki indeks inklusi keuangan terbesar, yaitu sebesar 0.59 tahun 2015. Hal dikarenakan, negara cina merupakan negara *upper middle income*. Sedangkan Indonesia dan Filipina merupakan negara *lowe middle income*. Meskipun negara *middle income* memiliki indeks inklusi keuangan di bawah negara *high income*, terdapat kecenderungan perbaikan dalam akses sektor perbankan setiap tahunnya. Usaha-usaha dalam menghilangkan hambatan akses jasa keuangan seperti meningkatkan jumlah kantor cabang bank khususnya di wilayah pedesaan.

Gambar 4: Nilai IFI negara Nepal, Tajikistan, dan Afganistan tahun 2010-2015



Sumber: data penelitian (2017)

Indeks inklusi keuangan di negara *ow income* seperti Nepal, Tajikistan, dan Afganistan rata-rata memiliki tren peningkatan. Di mana negara Afganistan memiliki indeks terkecil dibandingkan kedua negara lainnya. Jumlah mesin ATM pada tahun 2015 kurang dari 1 per 100.000 orang dewasa. Berbeda dengan Jepang, di mana setiap 100.000 orang dewasa dapat mengakses 128 mesin ATM. Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan yang sangat besar antara Afganistan dengan Jepang, sehingga tingkat inklusi keuangan sangat jauh berbeda.

Rendahnya indeks inklusi keuangan di Afganistan menunjukkan akses terhadap jasa keuangan sangat sulit. Sehingga masih terdapat banyak hambatan bagi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan, khusus keuangan formal seperti perbankan. Selain karena jumlah kantor cabang yang masih minim, produk jasa perbankan yang ditawarkan masih rendah dan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara yang bersangkutan.

b. Pengaruh Variabel Sosial Ekonomi terhadap Inklusi Keuangan

Menurut Sarma (2012) ada beberapa indikator pembangunan yang mempengaruhi inklusi keuangan di suatu negara, yaitu seperti indikator variabel sosial ekonomi, variabel infrastruktur, dan variabel perbankan. Namun dalam penelitian ini indikator pembangunan yang dianalisis hanya dilihat dari variabel sosial ekonomi. Adapun hasil estimasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2: Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP	-0.475274	0.244439	-1.944342	0.0586
TP	-0.211668	0.085949	-2.462721	0.0180
JD	-0.120506	0.027513	4.379964	0.0001
C	-0.593623	2.762673	-0.214873	0.8309

Sumber: data penelitian (2017)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 2 dengan α sebesar 5%, didapatkan bahwa variabel GDP perkapita dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh indeks inklusi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien GDP perkapita, di mana nilai koefisien sebesar 0.0586 di bawah nilai α .

Tingkat pengangguran signifikan memengaruhi negatif terhadap indeks inklusi keuangan. Menurut Goodwin (2000) faktor yang dapat dikaitkan dengan inklusi keuangan adalah angkatan kerja. Pengangguran atau mereka yang memiliki pekerjaan tidak tetap dan tidak aman cenderung untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan. Beberapa studi menemukan bahwa pembayaran upah melalui transfer tunai otomatis telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi inklusi keuangan (Sarma and Pais, *Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis* 2012). Selain itu, dengan banyaknya angkatan kerja yang bekerja di lapangan kerja sektor formal bisa menyiratkan partisipasi dalam sistem keuangan formal melalui penerimaan upah dan gaji dengan sistem transfer tunai tersebut. Dengan demikian proporsi tenaga kerja sektor formal akan menjadi indikator penting dari tingkat inklusi keuangan. Sehingga, semakin kecil jumlah pengangguran, maka semakin besar peluang dalam mengakses jasa perbankan, hal ini akan meningkatkan tingkat inklusi keuangan pada negara Asia.

Jumlah penduduk di pedesaan signifikan memengaruhi negatif terhadap indeks inklusi keuangan. Menurut Leyshon (1995), masyarakat pedesaan memiliki kecenderungan kecil dalam mengakses jasa keuangan. Kebanyakan daerah pedesaan merupakan daerah dengan infrastruktur yang buruk, menyebabkan sulitnya dalam menyediakan jasa keuangan. Jika akses keuangan terjangkau, hal ini akan menimbulkan biaya transaksi yang cukup besar bagi penyedia jasa keuangan, sehingga penyedia jasa keuangan sulit dalam merencanakan dan membuka akses keuangannya di pedesaan. Selain besarnya biaya transaksi, produk-produk yang ditawarkan oleh jasa keuangan pun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, semakin sedikitnya jumlah masyarakat di pedesaan, maka akses jasa keuangan semakin mudah, sehingga meningkatkan tingkat inklusi keuangan.

Pada tabel 4 dapat diketahui pula koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.783244 atau sebesar 78%. Ini berarti bahwa kontribusi dari variabel GDP perkapita, tingkat

pengangguran, dan jumlah penduduk di pedesaan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel indeks inklusi keuangan sebesar 78%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 22 % dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan regresi pada penelitian ini.

Uji F statistik digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil didapatkan F hitung sebesar 224.0531, dengan Sig F (0,000) yang lebih kecil dari 5% (0,05) menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel variabel GDP perkapita, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk di pedesaan secara bersama sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel indeks inklusi keuangan.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk menjadi alat penting bagi pengambil kebijakan untuk menggunakannya sebagai perbandingan dan motivasi untuk semakin menganut prinsip inklusif dalam keuangan. Artikel ini memberikan paling tidak dua kesimpulan, *pertama*, perbandingan indeks inklusi keuangan di beberapa negara Asia dengan menggunakan dimensi penetrasi perbankan ketersediaan jasa perbankan, dan kegunaan. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum inklusi keuangan di negara Asia utamanya dipengaruhi oleh dimensi kegunaan. Salah satu kegunaan dari sistem keuangan oleh IMF diproporsikan dalam indikator proporsi kredit yang disalurkan terhadap GDP. Kredit/pinjaman ini digunakan oleh rumah tangga dan pengusaha. Jasa-jasa keuangan seperti penyaluran kredit, tidak digunakan dengan baik, walaupun masyarakat memiliki akses terhadap jasa keuangan.

Kedua, melihat pengaruh indikator pembangunan berupa variabel sosial ekonomi terhadap indeks inklusi keuangan di beberapa negara Asia pada periode 2010-2015. Dapat disimpulkan bahwa hanya variabel GDP perkapita yang tidak signifikan berpengaruh secara parsial. Sedangkan variabel lainnya, yaitu tingkat pengangguran dan jumlah penduduk di pedesaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks inklusi keuangan. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap indeks inklusi keuangan adalah jumlah penduduk di pedesaan karena memiliki nilai koefisien paling besar.

Mengacu pada kesimpulan di atas, beberapa implikasi dan saran yang dapat diberikan, pertama bagi negara Asia, peningkatan inklusi keuangan harus diikuti oleh

penurunan hambatan dalam mengakses layanan jasa-jasa keuangan formal serta menambah produk perbankan yang lebih sesuai khususnya dengan masyarakat berpendapatan rendah. Misalnya kredit mikro untuk usaha kecil dan menengah dan menambah outlet perbankan yang menjangkau pedesaan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya inklusi keuangan, dengan demikian masyarakat akan merasa bahwa jasa keuangan sangat penting dan dekat dalam jangkauannya.

V. Daftar Pustaka

- Demirgüç-Kunt, Asli, Thorsten Beck, and Patrick Honohan. 2008. *Finance for all? Policies and Pitfalls in Expanding Access*. The International Bank for Reconstruction and Development, Washington DC: The World Bank.
- Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas . 2015. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia*. Laporan Triwulan IV tahun 2015, Jakarta: Deputi Bidang Ekonomi Bappenas.
- Dienillah, Azka Azifah, and Lukytawati Anggraeni. 2016. "Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Volume 18, Nomor 4.
- Goodwin, D., L. Adelman, S. Middleton, and K. Ashworth. 2000. "Debt, Money Management and Access to Financial Services: Evidence from the 1999 PSE Survey of Britain." *1999 PSE Survey Working Paper 8, Centre for Research in Social Policy* (Loughborough University).
- International Monetary Fund. 2016. *IMF Finance*. International Monetary Fund. <http://www.imf.org/external/index.htm>.
- Leyshon, A., and Thrift N. 1995. "Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States." *Transactions of the Institute of British Geographers* .
- Sanjaya, I Made, and Nursechafia. 2015. "Inklusi Keuangan dan pertumbuhan Inklusi: analisis antar Provinsi di Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 3.
- Sarma, Mandira. 2008. "Index of Financial Inclusion." *Indian Council for Research on International Economic Relations*.
- Sarma, Mandira, and Jesim Pais. 2012. "Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis ." *Indian Council for Research on International Economic Relations*.
- The World Bank. 2016. *World Bank Open Data*. Accessed Desember 15, 2016. <http://data.worldbank.org/>.

